



Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan

Hani Siti Hanifah¹; Eliya Fatma Harahap²; Intan Noviyanti Hidayat³

Universitas Garut
HaniSiti1965@uniga.ac.id

Abstrak

This study aims to determine the effect of implementing government accounting standards and internal control systems on the quality of financial reports. Length of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Garut Regency. The population used as a sample is as many as 55 respondents. The research method is a quantitative method with data collection through literature, questionnaires, and interviews. While the data processing technique uses the SPSS version 21.0 statistical application. The results showed that simultaneously government accounting standards and internal control systems have an effect on the quality of financial reports.

Keywords: *Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Quality of Financial Statements*

1. Pendahuluan

Laporan keuangan sektor publik merupakan suatu komponen yang penting dalam menciptakan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik. Lembaga-lembaga publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik maka dibutuhkan dedikasi dan integritas yang tinggi. Cîrstea, A. (2014) entitas sektor publik harus menyiapkan laporan konsolidasi dan regulator dimana pemerintah memainkan peran penting dalam mengambil dan memperkenalkan ke dalam sektor publik, tidak ada keunggulan dalam akuntansi tanpa keunggulan dalam pelaporan atau sebaliknya. Sudah sepatutnya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern.

Setiap tahun, semua laporan keuangan pemerintah daerah akan memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu berarti bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dan berkualitas. Namun lain halnya ketika BPK mengeluarkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini WDP tersebut akan diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Menurut BPK, opini (WDP) yang diberikan BPK menunjukkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang bersangkutan belum optimal. Kelemahan pengendalian *intern* dalam pengelolaan keuangan daerah sebagian besar karena belum memadainya unsur-unsur pengendalian internal. (Rusvianto, 2018; Sri Mulyani, 2018; Indri Yuliafitri, 2018). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan demi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan adanya PP-SPIP maka setiap

menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati atau walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1). (Rusvianto, dkk. 2018).

Berikut disajikan dalam tabel 1.1 hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Garut selama 6 tahun, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1: Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Garut Jawa Barat

Tahun	Opini			
	WTP	WDP	TW	TMP
2012		✓		
2013		✓		
2014		✓		
2015	✓			
2016	✓			
2017	✓			

Sumber: IHPS 1 tahun 2017, BPK RI.

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
 WDP : Wajar Dengan Pengecualian
 TW : Tidak wajar
 TMP : Tidak Memberikan Pendapat

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa Kabupaten Garut pada tahun 2012-2014 mendapat opini wajar dengan pengecualiaan. Namun pada tahun 2016 opini tersebut berubah menjadi wajar tanpa pengecualian. Alasan mengapa kabupaten Garut dari tahun 2012-2014 memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) disebabkan karena dalam pengelolaan aset barang milik daerah tersebut masih menjadi titik lemah Pemkab Garut untuk memperoleh penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan pengelolaan keuangannya. Giglio, J. M., Friar, J. H., & Crittenden, W. F. (2018) mekanisme pendanaan dan pelaporan keuangan harus dibuat untuk memastikan keputusan manajemen aset siklus hidup yang efektif dan efisien. Kemitraan publik-swasta (KPS) juga perlu dipupuk untuk membantu mengatasi kekurangan regional dalam infrastruktur.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP aspek penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Stadler, C., & Nobes, C. W. (2018), adapun akuntansi untuk hibah pemerintah berdasarkan Standar Pelaporan Keuangan Internasional menunjukkan bahwa hibah aset secara ekonomis penting bagi beberapa perusahaan dan frekuensi hibah berbeda secara signifikan di seluruh negara perusahaan dapat menunjukkan hibah sebagai pendapatan ditangguhkan atau bersih terhadap aset pilihan kebijakan harus dihapus dari standar akuntansi.

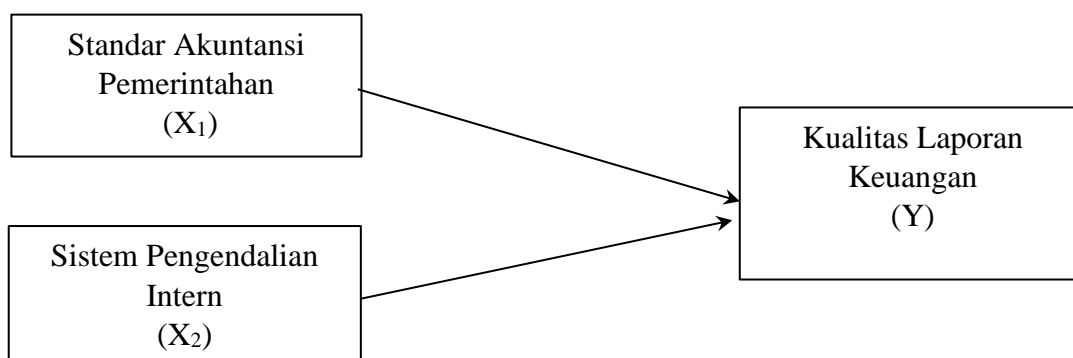
2.2 Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan, Sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur- unsur pengendalian intern antara lain Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi dan Pemantauan. Pada penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Muskanan, M. (2014), faktor yang paling signifikan mendorong pejabat tinggi memiliki komitmen yang buruk adalah konflik kepentingan. Studi ini juga menemukan bahwa konflik kepentingan sosial adalah alasan yang paling umum dipicu mendorong pejabat tinggi untuk kurang berkomitmen.

2.3 Kualitas Laporan Keuangan

PP nomor 71 tahun 2010 laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila mengandung karakteristik yang telah ditetapkan, sehingga informasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar pembuatan keputusan bagi penggunaannya. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik (Mardiasmo,2009). Aziz, M. A. A., Rahman, H. A., Alam, M. M., & Said, J. (2015), untuk meningkatkan akuntabilitas di sektor publik, maka faktor internal organisasi yang memiliki pengaruh pada akuntabilitas; sistem integritas, sistem kontrol internal dan kualitas kepemimpinan.



Gambar 2.1
Model Penelitian

3. Metode

Metode Penelitian deskriptif verifikatif dengan variabel bebas standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern serta variable terikat adalah kualitas laporan keuangan. Populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu seluruh pegawai yang berhubungan dengan proses penyusunan laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut yaitu sebanyak 55 pegawai dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Jenis data adalah data kuantitatif dan Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Sebab, peneliti memperoleh secara langsung data yang diperlukan. Penelitian Lapangan (*Field Research*) melalui Wawancara, Kuesioner, Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan Studi Internet (*Internet Research*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan uji kualitas data, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS versi 2.

Pada penelitian ini, uji normalitas yang digunakan dengan teknik Kolmogorov-Smirnov, Uji Multikolinearitas dengan TOL (*tolerance*) dan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan uji heteroskedastisitas dengan metode analisis grafik, pada metode ini peneliti mengamati *scatterplot* dimana sumbu horizontal menggambarkan *Predicted Standardized* sedangkan sumbu vertikal menggambarkan nilai *Residual Standardized*. Jika *scatterplot* menyebar secara acak maka mengindikasikan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model yang dibentuk.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Uji Pengaruh Simultan (F-Test)

Tabel 4.1: Hasil Uji Regresi Linear Berganda (F-Test)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	250.019	2	125.010	24.625	.000 ^b
	Residual	263.981	52	5.077		
	Total	514.000	54			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintahan

Sumber: Output SPSS Versi 21, Diolah Tahun 2019.

Tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa diperoleh F hitung 24,625 dengan signifikansi 0,000. Dalam penelitian ini digunakan sig. 5% dan *degree of freedom* (df) sebesar (k-1) = 2 dan (n-k) = 52 sehingga diperoleh F tabel sebesar 3,17. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nilai F hitung > F tabel dengan sig. lebih kecil dari *Alpha* (0,000 < 0,05) sehingga hipotesis ketiga diterima yang berarti Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan. Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2015), kualitas pelaporan keuangan, pengendalian internal memberikan dampak yang lebih baik, signifikan, dan pengaruh positif terhadap tata pemerintahan yang baik.

4.2 Uji Pengaruh Parsial (t-Test)

Tabel 4.2: Hasil Uji Regresi Linear Berganda (t-Test)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.414	3.928		2.651	.011
	Standar Akuntansi Pemerintahan	.175	.073	.246	2.383	.021
	Sistem Pengendalian Intern	.944	.166	.588	5.686	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Output SPSS Versi 21, Diolah Tahun 2019.

Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pada kolom B baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan koefisien variabel independen. Berdasarkan Tabel 4.35 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 10,414 + 0,175X_1 + 0,944X_2$$

4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.3: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.697 ^a	.486	.467	2.253

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintahan

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Output SPSS Versi 21, Diolah Tahun 2019.

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa besarnya Adjusted R Square adalah 0,467 atau 46,7%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi pengaruh variabel independen (Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern) terhadap variabel dependen (Kualitas Laporan Keuangan) sebesar 46,7% sedangkan sisanya 53,3% (100% - 46,7%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain (*epsilon*) yang tidak terdapat pada penelitian ini.

5. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Variabel standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai *Sig.* 0,021 < 0,05. Sehingga hal ini menunjukkan H_0 ditolak dan H_1 diterima maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Garut.

Adapun Variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai *Sig.* 0,000 < 0,05. Sehingga hal ini menunjukan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima maka sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Garut. Pada Variabel standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Garut. Oleh karena itu variable penelitian memberikan gambaran pada hipotesis awal yang mengharuskan terwujudnya goodgovernment, Afonso, Antonio and Jalles, João Tovar (2014) terdapat hubungan antara kausalitas antara pengeluaran pemerintah, pendapatan dan pertumbuhan. Pengelolaan sistem keuangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga perlu selalu dipertahankan.

Daftar Pustaka

- Achmad, N.R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12296/1/Faktor-faktor%20yang%20mempengaruhi%20kualitas%20laporan%20keuangan%20dengan%20sistem%20pengendalian%20internal%20sebagai%20variabel%20monitoring.pdf>
- Aziz M.A.A, Rahman H.B, Alam M, Said J. (2015). Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study. DOI: 10.1016/S2212-5671(15)01096-5. Conference: 7th International Conference on Financial Criminology, At Wadham College, Oxford University, United Kingdom,, Volume: Procedia Economics and Finance, Vol. 28, pp. 163–169. https://www.researchgate.net/publication/283967703_Enhancement_of_the_Accountability_of_Public_Sectors_through_Integrity_System_Internal_Control_System_and_Leadership_Practices_A_Review_Study

- Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2015). *The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and its Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government in South Sumatera*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 811–818. doi:10.1016/j.sbspro.2015.11.172
- Afonso, Antonio and Jalles, João Tovar, Causality for the Government Budget and Economic Growth (April 27, 2014). Department of Economics, ISEG-UL, Working Paper n° WP07/2014/DE/UECE. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2429909> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2429909>
- Cîrstea, A. (2014). *The Need for Public Sector Consolidated Financial Statements*. *Procedia Economics and Finance*, 15, 1289–1296. doi:10.1016/s2212-5671(14)00590-5
- Driteny R. Gambaran Umum Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. PPSDMMIGAS (Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi). http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/m1_-_Gambaran_Umum_---_Rela_Driteny.pdf
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>
- Giglio, J. M., Friar, J. H., & Crittenden, W. F. (2018). *Integrating lifecycle asset management in the public sector*. *Business Horizons*, 61(4), 511–519. doi:10.1016/j.bushor.2018.03.005
- Hardiansyah. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Polewali Mandar). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3371/1/hardyansyah.pdf>
- Kusumawardani. (2018). Manajemen Aset Tanah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Serang (Studi Kasus : Kelurahan Kepuren). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. <http://repository.fisip-untirta.ac.id/942/1/MANAJEMEN%20ASET%20TANAH%20DI%20BADAN%20PENGELOLAAN%20KEUANGAN%20DAN%20ASET%20DAERAH%20KOTA%20SERANG%20%28Studi%20Kasus%20%20Kelu%20-%20Copy.pdf>
- Stadler, C., & Nobes, C. W. (2018). *Accounting for government grants: Standard-setting and accounting choice*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 37(2), 113–129. doi:10.1016/j.jaccpubpol.2018.02.004
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Munasyir. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Magister Akuntansi ISSN 2302-0164 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 13 Pages pp. 23- 35. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/download/4486/3862>
- Muskanan, M. (2014). *The Effectiveness of the Internal Controlling System Implementation in Fiscal Decentralization Application*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 180–193. doi:10.1016/j.sbspro.2014.11.066
- Nurillah A.S. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota

Depok). Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
<http://eprints.undip.ac.id/42846/1/NURILLAH.pdf>

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Rusvianto, D., Mulyani, S. & Yulia fitri, I. (2018). *Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Bandung)*. Jurnal Banquesyar'i Vol. 4 No. 1. Retrieved September 14th, 2018.

Sukmaningrum. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang). Jurnal universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/35305/1/JURNAL.pdf>